

Penyiapan Bumdes Berbasis Pariwisata

Muchammad Ichsan¹, dan Juhari²

¹ Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183. No telp 081328299898

² Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: driichsan65@yahoo.com

Abstrak

Upaya pemerintah mengajak masyarakat desa melakukan wirausaha mulai menunjukkan langkah konkrit sejak digalakkannya pendirian badan usaha milik desa (BUMDes). Setiap desa diharapkan dapat membentuk badan usaha yang mempunyai pengurus dan obyek yang dapat dijadikan wahana bisnis. Desa Donoharjo yang terletak di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman mempunyai obyek wisata menarik berupa embung Jetis Suruh, tetapi belum terkelola dengan baik. Pendirian BUMDes dengan basis pariwisata menjadi upaya konkrit Desa Donoharjo untuk mengembangkan desanya. Melihat potensi tersebut, dilakukan pra-survey ke lokasi dan dilakukan wawancara dengan berbagai pihak sehingga teridentifikasi permasalahan berikut: 1) belum adanya pengelola yang mumpuni untuk mengelola embung Jetis Suruh menjadi obyek wisata unggulan, 2) belum adanya dokumen tata kelola pelaksanaan BUMDes, 3) belum adanya perencanaan untuk pengembangan lembaga, 4) belum adanya pembagian tugas di antara pengelola, 5) belum tersedianya media akun medsos dan web, 6) belum tersedianya paket wisata, 7) belum adanya cinderamata khas Donoharjo, dan 8) kurangnya pembinaan terhadap kelompok kesenian tradisional. Melalui program penyiapan BUMDes berbasis pariwisata diperoleh output berupa: terbentuknya pengurus BUMDes Donoharjo, dokumen tata kelola AD/ART, media promosi yang interaktif, dan tersedianya perencanaan yang komprehensif (Renstra). Melalui pendampingan manajemen yang intensif, BUMDes Donoharjo menjadi usaha profit dengan berbagai program yang produktif serta menambah pendapatan desa.

Kata Kunci: BUMDes, Pariwisata, Tata kelola, Renstra, Donoharjo

Pendahuluan

1. Analisis Situasi

Pembangunan masyarakat desa di Indonesia selalu menjadi perhatian penuh pemerintah. Berbagai kebijakan telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Desa-desa di Indonesia mengalami pasang surut dalam merespon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Merril, 2002). Pada akhir-akhir ini yang menjadi isu utama dalam pembangunan masyarakat desa adalah munculnya instruksi pemerintah agar pemerintah desa membuat badan usaha milik desa (BUMDes). Badan usaha

yang diinisiasi dan dijalankan oleh masyarakat desa dengan dibantu oleh pemerintah desa ini, diharapkan dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan kewirausahaan dan meningkatkan pendapatan desa.

Salah satu desa di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik yaitu Desa Donoharjo, merupakan desa yang mencoba untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut melalui pembentukan BUMDes. Namun hingga sekarang ini masih ditemui adanya kendala yang dikarenakan permasalahan sumberdaya yang masih kurang. Kalau dilihat dari potensi yang ada di Desa Donoharjo, sektor pariwisata bisa menjadi andalan untuk mengembangkan usaha yang diwadahi oleh BUMDes.

Pariwisata yang dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan permasalahan masyarakat untuk penurunan angka kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Damanik (2010) bahwa pariwisata mampu menjadi alternatif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pariwisata akan membawa trickle down effect bagi masyarakat sekelilingnya (Fandeli, 2003). Dengan adanya kegiatan pariwisata masyarakat menjadi bergerak untuk menawarkan jasa maupun keunikan yang ada di daerahnya, kondisi yang seperti ini tentu saja tidak seketika dapat diciptakan, perlu adanya proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi (Davis, 2005 dan Sunaryo, 2013).

Kondisi obyektif Desa Donoharjo apabila dilihat dari struktur pekerjaan masyarakat, masih mempunyai potensi untuk menyiapkan SDM dalam rangka mendukung pariwisata. Terdapat potensi berupa masyarakat yang bekerja di sektor swasta maupun jasa yang begitu besar, selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Struktur Pekerjaan Masyarakat

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	537
2	Pengrajin Industri	37
3	Buruh Tani	334
4	Industri	17
5	Bangunan	170
6	Perdagangan	8
7	Pengangkutan	20
8	PNS	207
9	TNI	16
10	POLRI	12
11	Jasa	225
12	Pegawai Swasta	702

13	Wiraswasta	173
14	Lainnya	451
15	Jumlah	2909

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Donoharjo, 2017

Pembentukan BUMDes sudah menjadi keputusan rapat desa, dengan melalui persetujuan BPD, kepala desa dalam waktu dekat di tahun 2019 harus dapat membentuk BUMDes. Lembaga baru ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkiprah dan meringankan beban belanja desa melalui usaha yang produktif. Secara khusus kepala desa Donoharjo memberikan dukungan kepada masyarakat untuk membentuk BUMDes dengan obyek wisata embung Jetis Suruh sebagai awal bidang garapnya. Sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara berikut ini:

BPD sudah memberi mandat kepada kami untuk membentuk BUMDes namun upaya untuk itu masih perlu persiapan yang matang. Pembentukan lembaga baru dengan personil baru tentu saja tidak mudah, demikian juga dengan bidang garap yang akan dipilih menjadi perdebatan. Kalau dilihat dari pedoman pembentukan BUMDes bisa melakukan bisnis apapun, bisa dagang, penjualan barang, penyediaan jasa dan lain-lain. Kami beserta perangkat sudah punya ide untuk mengembangkan embung Jetis Suruh yang sudah menjadi andalan untuk pariwisata sebagai bidang garapnya, jadi BUMDes dibentuk dengan jasa pariwisata sebagai ladang bisnisnya. (Wawancara, 8 Desember 2018).

Pembentukan BUMDes sebagai motor penggerak masyarakat dalam memajukan pariwisata memperoleh peluang baik dari segi regulasi maupun political will dari kepala desa. Upaya untuk membentuk BUMDes juga disambut baik oleh berbagai kalangan, baik dari unsur karang taruna, PKK, dan kelompok pedusunan. Untuk melakukan inisiasi pembentukan BUMDes tentu saja harus mengacu pada urutan pengembangan pariwisata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fandelli (2003) bahwa pengembangan pariwisata terutama pada obyek wisata yang akan dikelola paling tidak mempunyai tahap sebagai berikut: 1) identifikasi potensi wisata yang ada, 2) analisis pengelolaan obyek wisata, 3) manajemen ODTW, 4) pemasaran dan promosi wisata, dan 5) penataan kelembagaan obyek wisata.

Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung upaya masyarakat untuk mengembangkan pariwisata, terutama wisata alternatif yang memberikan warna baru bagi wisatawan. Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kabupaten Sleman memberikan arahan pada masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan untuk menciptakan obyek wisata yang baru sebagai alternatif obyek wisata yang sudah mapan seperti Kaliurang, Monjali, dan Volcano tour. Program-program pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan seiring

dengan keterbatasan peran pemerintah. Program pemberdayaan dapat berupa pengembangan SDM, penataan kelembagaan, inovasi pelayanan, pemasaran maupun penguatan jejaring.

2. Permasalahan Mitra

Desa Donoharjo merupakan desa yang ada di Kabupaten Sleman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. Dengan mengandalkan pada keunggulan wisata buatan berupa embung menjadi alternatif bagi tujuan wisata. Seluruh komponen yang ada di Desa Donoharjo, mulai dari perangkat desa dan masyarakatnya meyakini bahwa embung Jetis Suruh dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Sementara ini telah ada kegiatan wisata berupa outbound yang diselenggarakan oleh berbagai instansi maupun sekolah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: <https://www.google.com/search?q=embung+suruh+donoharjo+sleman&tbm>

Gambar 1. Wisatawan Melakukan Kegiatan Outbound

Di samping kegiatan outbound embung Jetis Suruh juga merupakan bagian dari agenda festival Merapi yang diselenggarakan oleh Pemkab Sleman yang melibatkan berbagai sponsor dari pihak swasta. Embung Jetis Suruh merupakan satu diantara tiga panggung pada festival Merapi. Dalam festival Merapi tersebut di embung Jetis Suruh ditampilkan festival band akustik dan kesenian tradisional, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2. Pentas Seni Dan Festival Merapi

Setiap hari minggu atau libur nasional banyak juga yang mencoba untuk menaiki cano atau perahu di tengah-tengah embung, sementara ini masih melibatkan pihak BNPB sebagai operatornya, karena yang punyai cano adalah pihak BNPB yang dipersiapkan untuk menangani bencana, sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 3. Pengunjung Memanfaatkan Embung



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Obyek wisata embung Jetis Suruh yang menjadi potensi wisata Desa Donoharjo selama ini belum ada lembaga yang mengelola. Pemerintah desa dan masyarakat masih mencari bentuk dan format pengelolaannya. Pada masa sekarang ini sudah mulai diinisiasi BUMDes yang direncanakan untuk mengelola embung tersebut. Rekrutmen SDM akan dimulai dan perlu juga disiapkan kelembagaan yang solid agar nantinya mampu mengelola embung Jetis Suruh secara profesional. Sebagaimana hasil wawancara dengan Carik Desa Donoharjo berikut ini:

Untuk pembentukan BUMDes sudah disetujui oleh BPD tetapi pelaksanaan dan gerakan untuk menjadi BUMDes yang unggul belum kelihatan. Upaya pembentukan baru sebatas restu dan sementara ini sudah melangkah untuk membuat peraturan desa. Rencananya BUMDes yang didirikan nanti bisa mengelola embung Jetis Suruh yang memang sudah ada potensinya. Kesenian tradisional dan makanan sebagai penunjang masih dalam proses pencarian ide, tetapi sebenarnya ada pembuatan kripik dan emping ketela. Kalau dibilang kendalanya ada atau tidak, ya jelas banyak kendala karena memang baru rintisan untuk menjadi obyek wisata.

(Wawancara, 8 Desember 2018)

Dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:

- a. Belum adanya pengelola yang mumpuni untuk mengelola embung jetis suruh menjadi obyek wisata yang unggulan,
- b. Belum adanya dokumen tata kelola yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan bumdes,
- c. Belum adanya perencanaan yang komprehensif untuk pengembangan lembaga,
- d. Belum tersedianya media akun medsos dan web sebagai wujud eksistensi lembaga,
- e. Belum tersedianya paket wisata yang dapat dipakai sebagai acuan wisatawan,
- f. Belum adanya cinderamata khas dari donoharjo yang berwujud kerajinan ataupun makanan kecil atau oleh-oleh, dan
- g. Kurangnya pembinaan pada kelompok kesenian sehingga kurang terarah dalam melakukan pertunjukan.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan metode pendampingan, dimana pihak mitra diharapkan aktif melakukan kegiatan sementara pengabdian memberikan fasilitasi dan transfer iptek kepada pihak mitra. Penentuan metode pelaksanaan dilakukan dengan melalui kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana pengabdian dan kedua mitra.

Strategi yang dipakai dalam pengabdian kepada masyarakat ini dengan menggunakan tahapan metode sebagai berikut: 1) Bidang **manajemen**, yaitu dengan penguatan kompetensi pengelola agar bisa mengelola BUMDes secara profesional, 2) **Bidang produksi**, karena lembaga yang menjadi obyek pengabdian masyarakat adalah lembaga inisiasi BUMDes maka produksi yang dimaksud disini adalah penyediaan tersedianya berbagai dokumen tata kelola dan terdapatnya pengelola yang mumpuni. Produk ini disusun dengan melalui *focus group discussion* (FGD) bersama-sama antara pelaksana pengabdian dengan mitra, dan 3) **Pemasaran**, dilakukan dengan melalui pembuatan brosur, materi di website obyek wisata embung Jetis Suruh. Metode yang dipakai dalam aspek pemasaran ini adalah melalui pendampingan pada pengelola agar mampu melakukan kegiatan pemasaran tersebut secara mandiri.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang penyiapan BUMDes berbasis pariwisata ini dimulai bulan Maret 2019 dengan melakukan koordinasi program dengan mitra pengabdian yaitu perangkat desa Donoharjo. Target dan luaran yang dihasilkan dari program pengabdian masyarakat ini dicapai dengan melalui model pemberdayaan yang berupa pendampingan manajemen, pelatihan dan penyusunan tata kelola organisasi. Model pemberdayaan masyarakat ini menghasilkan personalia BUMDes yang memahami tata kelola dan pemasaran produk dan jasa desa wisata, tersusunnya dokumen tata kelola, dan jobdesk yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

1. Fasilitasi Pembentukan BUMDes

Pemerintah Desa Donoharjo bersama Badan Perwakilan Desa sudah menyepakati untuk dibentuknya BUMDes, guna mewujudkan lembaga BUMDes tersebut sudah dimulai rapat-rapat yang melibatkan tokoh masyarakat. Dari berbagai rapat yang dilaksanakan sebagian besar masih belum memahami keberadaan dari BUMDes dan apa yang menjadi idealita dibentuknya BUMDes. Sebagian besar masih belum memahami bagaimana seharusnya mendirikan dan mengelola lembaga bisnis.

Gambar 4 Rapat Pengadaan Fasilitas Pendukung Wisata



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya fasilitasi dan pengarahan agar mereka memahami pembentukan BUMDes. Fasilitasi berupa pemberian informasi dan melakukan benchmark ke BUMDes yang sudah terbentuk dan mempunyai usaha yang sudah berkembang. Hal ini dikarenakan untuk pembelajaran masyarakat desa perlu dibimbing dan diberi contoh yang sudah berhasil.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyusunan kompetensi SDM yang layak untuk mengurus BUMDes dan proses rekrutmen serta seleksi. Perangkat desa dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) pembentukan BUMDes diberi wawasan dan

didampingi dalam menyusun kompetensi maupun menentukan cara rekrutmen dan mekanisme seleksi.

2. Penyusunan Dokumen Tata Kelola

Agar tercipta tata kelola organisasi yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi perlu dibuat pedoman bagi organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya. Pedoman yang berisi aturan dan tata cara penyelenggaraan organisasi dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk menyusun dokumen tersebut diperlukan adanya kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pengelola BUMDes dan beberapa perangkat desa yang berkaitan dengan BUMDes.

Penyusunan AD/ART yang berorientasi pada tantangan yang dihadapi oleh desa disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan mampu dilakukan oleh para instruktur maka diperlukan adanya *focus group discussion* (FGD) untuk merumuskannya. Didalam FGD tersebut diharapkan dapat dibahas mengenai prinsip-prinsip organisasi dan tata cara menjalankan roda organisasi. FGD tersebut dilaksanakan dengan dokumentasi sebagai berikut:



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019

Gambar 5 Penyusunan Dokumen Tata Kelola

3. Penyusunan Rencana Strategis

Setelah dirumuskan pedoman tata kelola yang jelas dan agar BUMDes dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan adanya FGD lanjutan yang berkenaan dengan penyusunan rencana induk atau rencana strategis (renstra). Kegunaan dari rencana strategis ini adalah memberikan arahan bagi BUMDes dalam menyusun program dan kegiatan di masa mendatang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk berhasilnya implementasi tersebut diperlukan adanya penelitian kecil terlebih dahulu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh BUMDes Donoharjo. Dari data yang telah

terkumpul tersebut kemudian disusunlah berbagai program strategis yang berisi capaian-capaian setiap tahun dan hingga sampai 5 (lima) tahun mendatang. Kegiatan ini meliputi FGD yang lebih operasional lagi dengan melalui praktek maupun simulasi dalam menghadapi permasalahan strategis.

Tahapan dalam penyusunan rencana strategis dimulai dari perumusan visi dan misi dari BUMDes Donoharjo yang kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan juga memperhatikan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Dari analisis SWOT tersebut maka BUMDes Donoharjo mampu untuk merencanakan program dan kegiatannya secara sistematis. Dalam rangka menyusun renstra tersebut dilakukan FGD yang melibatkan berbagai kalangan stakeholder antara lain pelaku usaha, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

4. Pembuatan Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan tata kelola dan perencanaan strategis maka diperlukan adanya kejelasan dalam bekerja bagi setiap pengelola BUMDes, kejelasan dalam bekerja dipandu oleh adanya rumusan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang didasarkan pada dokumen tata kelola berupa AD/ART. Perumusan tupoksi ini tentu hanya melibatkan tim perumus yang terdiri dari beberapa orang saja. Tim perumus dipandu oleh pendamping menyusun setiap personal dalam bekerja dan kontribusinya pada BUMDes.

Kesimpulan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Donoharjo perlu dioptimalkan. Hasil dari pelatihan dan pendampingan yang bersifat manajerial tersebut dapat meningkatkan kemampuan manajerial, teknis dan administratif para pengelola BUMDes di Desa Donoharjo. Untuk selanjutnya, desa wisata yang lebih representatif perlu disiapkan mulai dari paket wisata sampai dengan media promosi yang lebih efektif dan efisien guna memantapkan dalam melakukan pengembangan BUMDes Desa Donoharjo berbasis pariwisata. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah perlu pemasaran yang lebih masif melalui penyusunan paket wisata yang terintegrasi dengan objek wisata di daerah sekitar. Di samping itu juga perlu dilakukan benchmarking ke beberapa BUMDes yang sudah maju.

Ucapan Terima Kasih

Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) berjudul: "Penyiapan BUMDes Berbasis Pariwisata" ini terselenggara dengan baik dan hasilnya dapat dipublikasikan berkat fasilitas dan dana dari Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu pengabdian mengucapkan terima kasih dan *jazakumullah khairan* kepada Rektor UMY dan Kepala LP3M UMY.

Daftar Pustaka

- Damanik, Janianton. (2010). “Merancang Format Baru Pariwisata Yang Menyejahterakan Rakyat”. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fisipol UGM*. Yogyakarta.
- Davis, Eddie. (2005). *The Training Managers: A Handbook*. London: Kogan Page Limited.
- Fandeli, Chafid. (2003). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Merril, M.D. (2002). “First Principle of Instruction”. *Educational Technology Research and Development*, 50 (3).
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2016-2020 Desa Donoharjo